



Bentuk Tim Inspektorat Audit Internal
Kalbar Lima Kali WTP

WTP. Gubernur Cornelis mengangkat sertifikat WTP yang diserahkan BPK RI di Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/6). *RISKA NANDA-RAKYAT KALBAR*

PONTIANAK-RK. Pemprov Kalbar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya secara berturut-turut untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Predikat WTP itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VII RI Dr. Abdul Latief, SE, MM pada

► Halaman 4

TEKEN. Gubernur Cornelis menandatangani serah terima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2016 oleh BPK RI di Gedung Provinsi Kalbar, Senin (12/6). *Rizka Nanda/RK*



sidang Paripurna Istimewa DPRD Kalbar di Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/6).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kalbar M. Kebing L dan dihadiri Gubernur Drs. Cornelis, MH, Wakil Gubernur Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM dan Sekda Kalbar Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD serta undangan lainnya.

"Ini adalah hasil kerja keras Pemprov Kalbar beserta jajaran. Ini tidak didapatkan dengan mudah, kedepannya diharapkan akan semakin baik lagi, serta predikat yang sangat istimewa ini bisa dipertahankan," kata Gubernur Cornelis.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalbar atas segala bantuannya, sehingga Pemprov Kalbar bisa memperoleh WTP untuk kelima kalinya berturut-turut. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta SKPD mempunyai komitmen yang tinggi terhadap laporan keuangan. Ini juga berkat kerja keras dan hasil sinergi dari semua pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam fungsi pengawasannya," ujar gubernur dua periode itu. Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjalankan amanah. Telah bekerja sesuai dengan ketegasan Gubernur Kalbar yang selalu memerintahkan kepada seluruh pejabat jajaran Pemprov untuk mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau semua sudah sesuai prosedur, pastinya opini WTP itu akan diperoleh. Dalam pemberian opini ini, menunjukkan apakah memang pengelolaan keuangannya benar atau tidak," ungkapnya.

Wagub Christiandy mengatakan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Kalbar bisa lebih baik dari indeks nasional. Hanya saja terkendala di IPM yang masih rendah. Dikatakannya, jika dilihat dari catatan IPM Pemprov Kalbar, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Artinya, dengan sumber keuangan APBD yang terbatas, namun dapat menjalankan program kerja dengan baik dan benar. Dipastikannya membawa efek kesejahteraan.

"Khusus indeks IPM itu separtinya merayap dengan susah. Ada ahli menganalisa SDM yang merupakan salah satu unsur dari IPM. Namun pada kejadian Mandor itu kita pernah lost generation sehingga kita menjadi lebih di bawah," tuturnya.

Christiandy menegaskan kepada seluruh pejabat jajaran

Pemprov Kalbar untuk terus mengelola keuangan dengan baik. "Jadi jangan sampai misalnya kita dapat WTP, tapi pertumbuhan ekominya anjlok, itu mungkin menjadi pertanyaan," ungkapnya.

Diakuinya, pada rapat terakhir jajaran Pemprov Kalbar, gubernur ingin meletakkan satu pondasi yang kuat dengan membentuk tim inspektorat untuk mengawasi pengelolaan uang yang baik. Tim itu selalu mengaudit terlebih dahulu di internal Pemprov sebelum di audit kembali oleh BPK RI.

"Sehingga nanti, siapa pun yang mengestafet kami, tinggal mengikuti lagi sehingga tahun depan bisa dapat WTP lagi," harapnya.

Auditor Utama Keuangan Negara VII RI, Abdul Latief menjelaskan, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2016 diserahkan kepada DPRD dan Gubernur Kalbar. LHP atas LKPD tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2016 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari tujuh laporan. Meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan, bahwa penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2016 telah sesuai dengan SAP berbasis actual. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan "Wajar Tanpa Pengecualian" atas laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2016.

Pencapaian opini WTP Pemprov Kalbar untuk kelima kalinya, menurut Abdul Latief, menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Laporan: Riska Nanda
Editor: Hamka Saptono